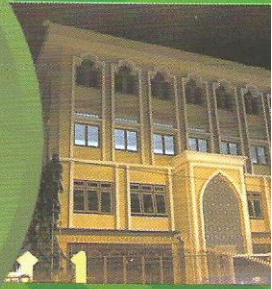
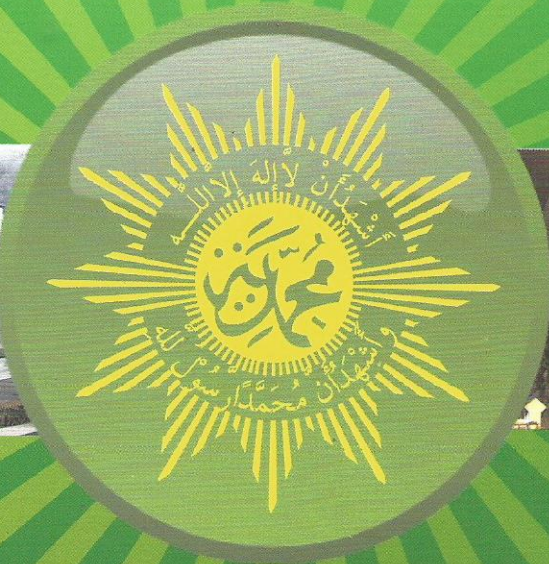


PENYUSUN

ZAMAH SARI | BUNYAMIN | AFNI RASYID | HILAL RAMADAN
RIFMA GHULAM DZALJAD | MUHAMMAD DWI FAJRI | ABDURAHMAN WAHID



KEMUHAMMADIYAHAN

- Muhammadiyah dan Pembaharuan Islam
- Landasan Ideologis Berdirinya Muhammadiyah
- Landasan Ideologis Gerakan Muhammadiyah
- Strategi Muhammadiyah
- Muhammadiyah dan Tajdid
- Struktur Organisasi Persyarikatan Muhammadiyah
- Pemberdayaan Ranting
- 'Aisyiyah dan Gerakan Pemberdayaan Perempuan
- Muhammadiyah dan Kebudayaan
- Muhammadiyah dan Ekonomi
- Muhammadiyah dan Pemberdayaan Mustadl'afin
- Aksi Dakwah Lapangan

PENYUSUN

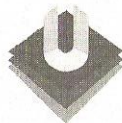
ZAMAH SARI | BUNYAMIN | AFNI RASYID | HILAL RAMADAN
RIFMA GHULAM DZALJAD | MUHAMMAD DWI FAJRI | ABDURAHMAN WAHID



Studi
KEMUHAMMADIYAHAN
Untuk Perguruan Tinggi

Editor

Zamah Sari | Hilal Ramadan | Muhib Rosyidi



UHAMKA PRESS

Studi

KEMUHAMMADIYAHAN

Untuk Perguruan Tinggi

Tim Penulis:

Zamah Sari, Bunyamin, Afni Rasyid, Hilal Ramadan
Rifma Ghulam Dzaljad, Muhammadi Dwi Fajri, Abdurrahman Wahid

Copyrights © UHAMKA Press, 2013

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

All rights reserved

Editor:

Zamah Sari, Hilal Ramadan, Muhib Rosyidi

Diterbitkan oleh:



UHAMKA PRESS

Jl. Gandaria IV, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7398898/ext: 112, Website: www.uhamkapress.com
E-mail: uhamkapress@yahoo.co.id

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)
Sari, Zamah, dkk., UHAMKA Press, Jakarta, 2013
ISBN: 978-602-8040-67-9

Cetakan I, November 2012
Cetakan II, Oktober 2013
Cetakan III, Oktober 2016

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin foto copy, tanpa izin sah dari
penerbit

Bab XI

MUHAMMADIYAH DAN PENDIDIKAN

...Syekh Ahmad Dahlan beliau meninggal pada permulaan tahun 1923, setelah menghabiskan usia dan seluruh kekayaan untuk Pergerakan Muhammadiyah yang beliau bangunkan itu. Mati dalam kemiskinan harta benda, tetapi kaya dengan sebutan kenang-kenangan dan bekas amal. Lekat pada sekolah-sekolah berdasar Islam sejak rendah, sampai menengah dan telah berdiri Sekolah Tinggi di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tahun 1956... (Pidato HAMKA ketika menerima gelar doktor honoris causa dari Universitas al-Azhar Mesir pada tanggal 21 Januari 1958)

"dadiyo kyai sing kemajuan lan aja kesel anggonmu nyambut gawe kango Muhammadiyah" (jadilah kyai atau orang yang berkemajuan dan jangan kenal lelah bekerja untuk Muhammadiyah)

Jadilah guru sekaligus murid. Menjadi guru yang selalu membagi ilmu dan menjadi murid yang selalu mencari ilmu." (2 Pesan Kyai Haji Ahmad Dahlan)

Pendahuluan

Sejarah umat Islam menunjukkan bahwa kejayaan Islam dibangun atas dasar penguasaan dan keluasan ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dengan beragam disiplinnya yang mewakili lahirnya sebuah peradaban agung yang diakui oleh dunia.

Pada zaman tersebut tampil pemikiran dan khazanah ilmu pengetahuan dari para ilmuwan muslim, seperti: al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina, Abu Bakar Ibn Zakaria al-Razi, al-Biruni, Ibn Rusyd, Muhammad Ibn Musa al-Khawarizmi, Ibn Haytam (al-Hazen), al-Ghazali, Ibn Khaldun, Jabir Ibn Hayyan, Shams al-Din al-Amuli, dan lain sebagainya.

Secara teologis, Islam mengajarkan nilai kepercayaan bahwa menuntut Ilmu hukumnya adalah *fardhu kifayah*. Hukum tersebut tidak sekedar perintah atau kewajiban, melainkan lebih bermakna pada tuntutan kesadaran akan kebutuhan untuk memenuhi diri dengan pengetahuan yang suci, yakni pengetahuan dan ilmu yang dapat menerangi kehidupan dan membawa pencerahan bagi alam semesta. Nilai kepercayaan ini senafas dengan kenyataan bahwa Islam bukan sekedar sistem kepercayaan atau ideologi, melainkan juga sebagai sumber idea dan berbagai disiplin ilmu. Islam dengan sumber pokoknya al-Qur'an dan Sunnah kaya dengan ajaran dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Selain itu, al-Qur'an dan Sunnah menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, baik mencakup bagaimana tuntutan dan adab belajar dan di dalam majelis ilmu, keutamaan ilmu, kewajiban menuntut ilmu maupun materi mengenai ilmu pengetahuan secara luas, baik sejarah, geografi, biologi, astronomi, zoologi, ekonomi, fisika, dan lain sebagainya.

Dalam konteks sejarah pengajaran ilmu pengetahuan atau pendidikan Islam kita temukan bahwa model pendidikan Islam senantiasa mengalami perkembangan, baik secara substansi maupun metodologi. Pendidikan Islam dapat dilacak dengan melihat pendidikan pada masa Rasulullah SAW yang dilakukan di rumah sahabat Arqam ibn Abi Arqam (*Dar al-Arqam*) atau dilakukan di dalam masjid dengan metode *halagah*, yakni pengajaran dengan membentuk lingkaran belajar mengelilingi sang guru (*murabbi*, kyai, atau *ustadz*). Selanjutnya pendidikan diselenggarakan di dalam *maktab/kuttab*, yakni semacam pondok untuk belajar. Sementara pada masa Khalifah al-Ma'mun pembelajaran dilakukan di lembaga yang disebut *Baitul Hikmah* atau *Darul Hikmah* pada masa Hakim bi-Amrillah/395 H atau *Darul Ilm* pada masa Abu Nasr Sabur bin Ardasyir/383 H, yaitu sebuah bangunan yang di dalamnya terdapat perpustakaan, tempat belajar, pusat penterjemahan dan penelitian, pusat kebudayaan, dan tempat diskusi simposium ilmiah. Lembaga pendidikan Islam selanjutnya disebut *al-madrasah* (sekolah) yang merupakan istilah yang diserap dari bahasa

the institution of higher learning (lembaga keilmuan tertinggi). Dimana tersebutlah beberapa madrasah seperti: *Madrasah Nizhamiyah*, *Madrasah Miyan Dahiya* di Nishapur Iran, *Madrasah Sa'idiyah* di Turki, *Madrasah Tajiyah* di Baghdad, serta *Madrasah Mustansiriah* dan *al-Nuriyah* di Syiria. Kemudian dalam perkembangan terakhir dikenal lembaga pendidikan tinggi sebagai pendidikan lanjutan setelah madrasah yang disebut *al-Jamiah* (universitas). Dalam sejarah Islam dikenal beberapa *al-Jamiah*, seperti: *al-Jamiah al-Azhar* yang didirikan pada Daulah Fatimiyah di Kairo Mesir, *al-Jamiah* di kota Sevilla, Cordoba, Granada, Toledo, dan kota lain di Andalusia (Spanyol) pada masa Daulah Umayyah (138-418 H/756-1027 M), *al-Jamiah Zaituna* di Tunisia, dan *al-Jamiah Qarawiyyin* di Fez.

Dengan mencermati konsep ilmu dan sejarah pendidikan Islam di atas, maka kita akan lebih mudah membaca mengenai arah perjuangan dan dakwah Muhammadiyah di bidang pendidikan. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan Muhammadiyah didirikan salah satunya adalah untuk membersihkan Islam dari pengaruh luar --kolonialisasi dan kristenisasi-- maupun untuk menghidupkan kesadaran di kalangan umat Islam untuk kembali kepada ajaran Islam. Tujuan dan dakwah Muhammadiyah tersebut hanya dapat dicapai dengan jalan mengentaskan umat Islam dari keterbelakangan dan kebodohan, yaitu memberikan pengajaran yang sesuai jiwa ajaran Islam dan pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan dan tantangan zaman (modernitas).

Itulah kenapa dalam tulisan di bawah ini akan dijelaskan mengenai pembaharuan pendidikan yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan merekam catatan historis tentang dualisme pendidikan pesantren dan Belanda, kelahiran sekolah Muhammadiyah dan pembaharuan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, paradigma dan filsafat pendidikan Muhammadiyah, serta tantangan dan harapan sekolah atau pendidikan Muhammadiyah saat ini.

Dualisme Sistem Pendidikan: Pesantren dan Pendidikan Hindia Belanda

Sejarah pendidikan Islam berada dalam dilema, sebab pendidikan Islam pada masa kemunduran Islam mengalami dualisme sistem pendidikan. Umat Islam satu sisi terbiasa dengan kelembagaan pendidikan pesantren yang hanya berpusat pada pendidikan ilmu agama

an sich. Sementara di sisi lain, umat juga dihadapkan pada kemajuan pendidikan Barat (Belanda) yang mengusung semangat *renaissance* di Barat, yakni memisahkan pendidikan dan ilmu pengetahuan dari agama. Walaupun terdapat ajaran agama sebagai bagian dari misi kolonisasi – *gospel, glory, gold* –, maka pastilah yang diajarkan hanya ajaran Kristen-Katolik.

Sejak abad ke-19 di Jawa telah tumbuh dualisme sistem pendidikan. Dua sistem pendidikan tersebut bermuara dari dua induk kehidupan yang saling terpisah. Pesantren berinduk pada kehidupan dan legitimasi masyarakat atau komunitas Islam. Sementara pendidikan Barat (Belanda) berinduk pada kehidupan sekuler dan legitimasi pemerintah kolonial Belanda.

Sistem Pendidikan Pesantren

Pesantren¹⁰⁴ menurut Kementerian Agama diartikan sebagai sebuah sistem pendidikan keagamaan yang memikul tanggung jawab bagi para muridnya untuk bertempat tinggal di dalam pondok (asrama)... (*the pesantren is a system of religious education making it obligatory for their students to stay in boarding schools...*). Pesantren sebagai tempat belajar para santri merupakan lembaga sosial di bidang pendidikan dan keagamaan yang mengajarkan, mengembangkan dan menyebarkan agama Islam. Menurut Kern, pesantren merupakan sebuah seminari bagi santri di daerah Jawa dan Madura. Pesantren adalah institusi bagi training teologi tingkat tinggi (*advanced*) yang terdiri dari beberapa bangunan, yang meskipun tidak dibangun terpisah dari suatu pemukiman, akan

104 Pesantren berasal dari kata “santri”, sedangkan kata “santri” berasal dari bahasa Sanskerta dari kata *sant* (orang baik) dan *tra* (suka menolong). Jadi “santra” berarti orang yang baik dan suka menolong. Kata “santra” kemudian berubah menjadi “santri”. Namun menurut CC. Berg, santri berasal dari kata “shastri” yang berarti ahli kitab suci keagamaan. Dalam perkembangannya, pesantren di kalangan pemerhati Islam ataupun masyarakat umum Indonesia dipahami sebagai lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan bagi santri menimba ilmu agama. Pesantren sering disamakan dengan pondok (*al-fundug*) yang berarti tempat bermalam atau penginapan. Sebab santri atau murid pesantren biasanya tidak hanya belajar melainkan tinggal dan menetap dalam masa pembelajaran di dalam pesantren. Mereka menempati pondok (kamar atau bilik tempat tinggal). Itulah kenapa pesantren sering disebut secara majemuk dengan sebutan pondok pesantren. Lihat lebih lanjut dalam MT. Arifin, 1987, *Pesantren dan Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, halaman 184-189.

tetapi paling tidak berada pada bagian yang terpisah dari pemukiman penduduk umumnya. Secara deskriptif Kern menggambarkan: “*the pesantren consists in the first place of the houses of the teacher and his assistants, then of lecture room, a chapel, rarely a Friday mosque, the lodging of the students (pondok), rice barns, all of which occupy a considerable space...*” (Pesantren pertama kali diselenggarakan di tempat tinggal para guru atau asistennya. Kemudian diperluas dengan ruang-ruang ceramah, sebuah kapel, masjid untuk jumatatan, pondokan, lumbung padi, yang kesemuanya merupakan tempat yang memungkinkan untuk memenuhi keperluan...).

Pesantren sebagai suatu sistem pendidikan memiliki beberapa unsur, yaitu: pondok, masjid, pengajaran kitab klasik (kitab kuning), santri, dan kyai.¹⁰⁵ Kesemua unsur tersebut terintegrasi dalam satu kesatuan sistem pendidikan pesantren yang menekankan hanya fokus pada pendidikan ilmu agama saja. Karena itu di lingkungan pesantren umumnya dipelajari *nahwu sharf, fiqh, ushul fiqh, tafsir, hadits, ushuluddin (aqidah), akhlak, tasawuf, dan tarikh*. Selanjutnya pengajaran ilmu agama yang bersumber dari kitab klasik (kitab kuning) tersebut dilakukan dengan menggunakan metode belajar sebagai berikut:

- a. Metode *sorogan* atau *bandongan*, yakni metode mempelajari kitab klasik, dimana satu persatu santri maju ke depan kyai sambil menyorongkan kitabnya ke depan kyai, kemudian santri membaca kitab yang telah diajarkan dan kyai membetulkan jika ada bacaan yang salah. Zamakhsyari Dhofier¹⁰⁶ menyebut metode sorogan sebagai “*sistem pengajian yang disampaikan kepada para santri secara individual*”. Kemudian Mastuhu¹⁰⁷ mengartikan metode sorogan adalah “*belajar secara individual dimana seorang santri berhadapan dengan seorang guru, sehingga terjadi interaksi saling mengenal diantara keduanya*”. Sementara M. Habib Chirzin¹⁰⁸ menjelaskan metode sorogan adalah “*santri menghadap kyai/guru seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajarinya*”. Intinya,

105 Zamakhsyari Dhofier, 1982, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, halaman 44-60

106 *Ibid*, halaman 28

107 Mastuhu, 1994, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, halaman 61

108 M. Habib Chirzin, 1985, *Agama, Ilmu, dan Pesantren*, dalam M. Dawam Bahardjo, *Pesantren dan Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, halaman 88

pada metode ini, santri mendengarkan dan menirukan bacaan kitab dari kyai. Selain itu, kyai dapat mengamati secara aktif kemajuan santri. Jika pelajaran yang lama belum dipahami, maka kyai tidak akan melanjutkan pelajaran yang baru.

- b. Metode *weton*, yakni metode pembelajaran yang setingkat lebih tinggi dari metode sorogan. Metode ini mirip dengan metode “*guru kula*” di masa Hindu, yaitu para santri bersama-sama duduk di dalam lingkaran mengelilingi kyai, dengan perhatian penuh pada kitabnya ketika kyai memberikan atau menerangkan pelajaran. Kemudian santri memberikan “bubuhan” (keterangan) pada kitabnya untuk menandai penjelasan pelajaran dari sang kyai. Pada metode *weton*, kyai membaca dan menerangkan bacaan kitab di hadapan sejumlah santrinya. Tetapi kyai tidak akan bertanya apakah santrinya sudah faham atau belum dengan pelajaran tersebut. Santri pun tidak diijinkan bertanya, kecuali kepada asisten kyai.

Itulah kenapa menurut Mahmud Yunus, metode pembelajaran pesantren yang demikian hanya satu arah (monolog) dari kyai kepada santri dan cenderung hanya menghasilkan sedikit lulusan yang berhasil¹⁰⁹. Hal ini sangat dimungkinkan sebab model pembelajaran pesantren yang demikian cenderung kurang aktif (*not-active learning*) atau tidak menjadikan santri sebagai subyek pembelajaran, serta kurang partisipatif—santri hanya sebagai obyek yang mendengarkan dan mengikuti apapun yang dikatakan kyainya.

Sementara jika dilihat secara keseluruhan, maka paling tidak terdapat 4 (empat) kekurangan mendasar dari sistem pendidikan pesantren, yaitu:

- a. **Tidak menggunakan sistem klasikal**

Pembelajaran di pesantren sebelum terintegrasi ke dalam Sistem Pendidikan Nasional dilakukan kalau tidak dibilik sang kyai, maka dilakukan di dalam masjid atau musholla dalam bentuk *halaqah* (murid duduk melingkari ustadz atau guru). Tidak ada ruang khusus belajar (kelas) dan tidak ada kontrak belajar yang terprogram seperti pada pendidikan modern. Karena itu di dalam pesantren tidak dikenal silabus atau kurikulum, tidak ada jadwal pengajar dan mata

pelajaran, serta alokasi waktu yang khusus untuk belajar. Santri di pesantren hanya belajar pada kyai menurut kesanggupan (waktu) dan keahlian kyai semata.

- b. **Tidak ada evaluasi belajar (ujian)**

Pendidikan di pesantren tidak mengenal adanya evaluasi belajar. Ukuran yang dipakai hanya kyai menerangkan dan santri menirukan. Pesantren tidak mengenal kualifikasi peserta didik juga level atau tingkatan pendidikan bagi peserta didik, sehingga tidak ada ukuran kapan santri dikatakan lulus dari pesantren. Karena tidak mengenal jenjang pendidikan, maka pengajaran di pesantren diselenggarakan sebagai rutinitas semata-mata belajar dan tidak mengenal ujian kenaikan atau kelulusan. Jika santri merasa cukup ilmu atau ia ingin mengali ilmu dari kyai lain, ia akan keluar dari pesantren dan belajar pada kyai dipesantren lain.

- c. **Tidak belajar ilmu pengetahuan umum**

Ciri yang membedakan pesantren dengan pendidikan kolonial atau sekolah umum adalah tidak diajarkannya mata pelajaran atau ilmu pengetahuan umum. Pesantren tidak mengenal dan mempelajari ilmu pengetahuan umum, seperti: fisika, biologi, kimia, matematika atau *al-jabar*, geografi, dan lain sebagainya, sekalipun jika melihat sejarah peradaban Islam, banyak sekali ilmuwan Islam yang ahli dalam keilmuan tersebut. Faktanya, pesantren hanya mengajarkan pelajaran agama (Islam) yang bersumber dari kitab-kitab klasik dari para ulama terdahulu yang terkait dengan bahasa Arab (*nahwu sharf, balagha, badi', dan ma'ani*), *fiqh, ushul fiqh, tafsir, hadits, ushuluddin (aqidah), akhlak, tasawuf, dan tarikh*.

- d. **Hanya mengandalkan hafalan**

Metode pengajaran di pesantren selain menerapkan metode sorogan dan *weton*, juga mengandalkan metode hafalan. Hampir semua materi pelajaran menekankan kemampuan atau penguasaan hafalan, baik hafalan al-Qur'an, hadist, kaidah *ushul fiqh*, maupun kaidah bahasa Arab. Pesantren dahulu lemah dalam hal analisa dan hal-hal yang bersifat diskursif.

Sistem Pendidikan Barat

Sistem pendidikan Barat atau kolonial Belanda merupakan model pendidikan formal Eropa dengan pendidikan umum didalamnya. Pendidikan Belanda tidak berlandaskan pada kesalehan agama atau tidak mengajarkan agama, melainkan lebih menekankan pada pemenuhan kemampuan dan keterampilan siswa untuk bisa menjadi perangkat atau pegawai (*ambtenaar*) pemerintah kolonial, baik di kantor pemerintah kolonial maupun gereja. Pendidikan Belanda ini bersifat sekuler dan menjadi kebijakan kolonial Belanda setelah tahun 1848.

Pendirian sekolah atau penyediaan pendidikan oleh pemerintah kolonial Belanda dilandasi kebijakan politik Ratu Wilhelmina yang disampaikan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda pada 17 September 1901. Menurut Ratu Wilhelmina pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (*een eerschuld*) terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis (*etische politiek*), yang terangkum dalam program *Trias Van Deventer* yang meliputi:

- Irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian
- Emigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi
- Edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan

Gagasan dan kebijakan mengenai politik etis berkembang seiring kemajuan industrialisasi di Eropa, di mana Barat perlu memberikan perhatian kepada daerah-daerah jajahan, sebab dalam pandangan Barat, daerah jajahan merupakan daerah penghasil bahan mentah sekaligus daerah konsumen barang-barang hasil industri Eropa. Karena itu setelah eksploitasi berjuta-juta kekayaan Indonesia oleh Belanda, maka pemerintah Belanda menurut HH. van Kol (anggota parlemen Belanda dari *Social Democratische Arbeiders Partij*), Pieter Brooshooft (wartawan Koran *De Locomotief*)¹¹⁰ dan Conrad Theodore

110 Pieter Brooshooft (1845 - 1921) adalah seorang wartawan dan sastrawan yang dikenal sebagai salah satu tokoh Politik Etis. Tahun 1887 Brooshooft mengadakan perjalanan mengelilingi Pulau Jawa, lalu menuliskan laporan tentang keadaan yang sangat menyedihkan di Hindia Belanda akibat kebijakan tanam paksa pemerintah. Dia menyampaikan laporan kepada 12 tokoh politisi Belanda terkemuka, disertai lampiran setebal buku yang memaparkan fakta-fakta yang dicatat dan ditandatangani 1255 orang. Laporan itu menuntut harus dibentuk sebuah partai Hindia agar kepen-

van Deventer¹¹¹ harus memberikan taraf hidup yang lebih baik –

tingan Hindia Belanda terwakili di Parlemen. Dilampirkan pula buku *Memorie over den toestan in indie* (Catatan tentang keadaan di Hindia), yang mengkritik struktur pajak dan mengecam sistem bandar. Tahun 1904 Brooshooft kembali ke Belanda dalam keadaan kecewa dan putus asa, karena merasa perjuangannya bagi keadilan terhadap pribumi tidak ada hasilnya. Tajuk Rencana yang terakhir ditulis berjudul: *Pemitan Dengan Orang Sakit*, dimuat pada surat kabar Semarang, *De Locomotief*, tanggal 31 Desember 1903. Setelah di Belanda, Brooshooft tetap rajin menulis, antara lain sebuah naskah pentas: *Arm Java* (Kasihani, Pulau Jawa), pada 1906. Naskah ini dianggap memiliki benang merah dengan eksistensi dan riwayat Kartini, sebab di dalamnya ada tokoh Murtinah, puteri seorang Bupati modern yang telah maju pikirannya. Diceritakan Murtinah sering menulis dalam majalah-majalah wanita di Belanda dan mengadakan surat-menyurat dengan teman-teman di negeri itu pula. http://id.wikipedia.org/wiki/Pieter_Brooshooft

111 Conrad Theodore van Deventer (1857-1915) dikenal sebagai salah seorang pemrakarsa politik etis atau balas budi Belanda pada pribumi. Melalui politik etis ini didirikan sekolah-sekolah di Indonesia oleh Belanda. Pengaruh Van Deventer mulai ada sejak tahun 1899, ketika Van Deventer menulis dalam majalah *De Gids* (Panduan), berjudul *Een Eerschuld* (Hutang kehormatan). Pengertian *Eerschuld* secara substansial adalah "Hutang yang demi kehormatan harus dibayar, walaupun tidak dapat diuntut dimuka hakim". Tulisan itu berisi angka-angka konkret yang menjelaskan pada publik Belanda bagaimana mereka menjadi negara yang makmur dan aman (adanya kereta api, bendungan-bendungan, dst) adalah hasil kolonialisasi yang datang dari daerah jajahan di Hindia Belanda ("Indonesia"), sementara Hindia Belanda saat itu miskin dan terbelakang. Jadi sudah sepantasnya jika kekayaan tersebut dikembalikan. Kemudian pada saat Van Deventer menjadi anggota Parlemen Belanda, ia menerima tugas dari menteri daerah jajahan Idenburg untuk menyusun sebuah laporan mengenai keadaan ekonomi rakyat pribumi di Jawa dan Madura. Dalam waktu satu tahun, Deventer berhasil menyelesaikan tugasnya (1904). Dengan terbuka Deventer mengungkapkan keadaan yang menyedihkan, kemudian dengan tegas mempersalahkan kebijakan pemerintah. Tulisan itu sangat terkenal, dan tentu saja mengundang banyak reaksi pro-kontra. Sebuah tulisan lain yang tak kalah terkenalnya adalah yang dimuat oleh *De Gids* (1908) ialah sebuah uraian tentang Hari Depan *Insulinde*, yang menjabarkan prinsip-prinsip etis bagi *beleid* pemerintah terhadap tanah jajahannya. Van Deventer sekembalinya dari Indonesia di tahun 1897 selain mendorong pemerintah Belanda mendirikan sekolah di Indonesia, dia dan istrinya berjasa mendirikan sekolah guru putri atau *Van Deventer Vereeniging Vor West Java* di tahun 1918 di bawah Yayasan Van Deventer. Kepedulian yang terjadi setelah Van Deventer berkenalan dan membaca tulisan RA. Kartini yang diterbitkan oleh J.H. Abendanon (1852-1925) Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Belanda (1900-1905) yang sejak tahun 1900 ikut berjasa mendirikan sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah. http://id.wikipedia.org/wiki/Van_Deventer

memberikan pendidikan yang memadai kepada rakyat-- sebagai balas budi Belanda terhadap rakyat pribumi Hindia Belanda. Di sisi lain juga tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan pendidikan kolonial Belanda juga merupakan upaya untuk mendukung sistem tanam paksa (*cultuur stelsel*) dan mengikis peranan pesantren --diperlukan sebagai media internalisasi nilai dan budaya Barat (westernisasi dan sekularisasi) sesuai pemikiran Snouck Hurgronje sebagaimana diterapkan oleh D. Fock Menteri Urusan Tanah Jajahan di tahun 1905 dan Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz pada masa setelahnya.

Setelah A.W.F. Idenburg diangkat sebagai Gubernur Jenderal sebagai konsekuensi kemenangan partai sayap kanan (koalisi Partai Liberal dan Partai Kristen), dibuatlah kebijakan perluasan pengaruh penjajahan (*Pax Nederlandica*) dengan menggunakan agama yang diselenggarakan melalui perluasan pendidikan. Sejak tahun 1909 pemerintah kolonial Belanda memberikan kedudukan yang sama antara sekolah pemerintah dan sekolah agama, bahkan Belanda membuka sekolah agama di seluruh daerah. Selain itu, kebijakan pembukaan dan perluasan sekolah agama juga didukung kebijakan terselubung *Pax Nederlandica* dalam bentuk "Edaran Minggu" (berita ruhani Kristen) dan "Edaran Pasar" (berita atau anjuran pemerintah) di tahun 1910.¹¹²

Karena itu tidak mengherankan, sekalipun pada tahun 1854 pemerintah kolonial Belanda membuat konstitusi dan peraturan administrasi baru yang mencantumkan tentang upaya mendorong pembangunan sekolah bagi kaum pribumi, namun dalam praktiknya sekolah-sekolah Belanda, baik sekolah pemerintah maupun sekolah agama selain mengajarkan agama Kristen juga lebih diperuntukkan bagi murid pribumi yang memeluk agama Kristen, anak bupati (*regent*), dan anak tuan tanah.

Sekolah Belanda ini dibuat berdasarkan klasifikasi, yaitu:

- a. *Tweede Klasse* (Ongko Loro): sekolah yang ditempuh selama 3 (tiga) tahun bagi anak pejabat menengah dengan pelajaran berhitung, menulis dan membaca, dengan bahasa pengantar bahasa daerah

Sejak tahun 1907 di daerah pedesaan, sekolah ini dirintis dengan nama Sekolah Desa (*Volkschool*).

- b. *Eerste Klasse* (Ongko Siji): sekolah bagi anak pegawai tinggi dilakukan mulai dari 4 tahun hingga 7 tahun yang mengajar beragam pelajaran umum, seperti: ilmu bumi, sejarah, ilmu hayat, menggambar, ilmu ukur tanah, dengan pengantar bahasa Melayu pada 3 tahun pertama dan setelah itu menggunakan bahasa Belanda. Sekolah Ongko Siji (*Eerste Klasse*) dalam perkembangannya di tahun 1912 diubah menjadi Sekolah Belanda-Indonesia (*Hollandsch Inlandsche School* HIS). Sekolah ini juga didirikan di daerah pedesaan dengan nama Sekolah Sambungan (*Vervolg School*). Bagi murid Sekolah Desa (*Volkschool*) dapat meneruskan ke Sekolah Sambungan (*Vervolg School*) setelah terlebih dahulu menempuh pendidikan di Sekolah Sambungan (*Schakel School*) untuk belajar Bahasa Belanda selama 3 (tiga) tahun.

Sementara untuk memenuhi kebutuhan guru sekolah *Tweede Klasse* dan *Eerste Klasse* tersebut, pemerintah Belanda pada tahun 1852 mendirikan Sekolah Guru (*Kweekschool*) di Surakarta. Sekolah ini berkembang pesat karena menarik minat banyak priyayi Jawa, sebab lulusan *Kweekschool* menjadi profesi yang prestisius dan terhormat pada saat itu.

Dalam hal pendidikan sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hingga tahun 1871 pemerintah kolonial Belanda menerapkan beberapa kebijakan tentang pendidikan sebagai berikut:

1. Jumlah sekolah guru perlu ditambah;
2. Sekolah tingkat dasar terutama ditujukan untuk mendidik anak-anak bangsawan, tetapi juga anak-anak orang kebanyakan;
3. Pengajaran dengan menggunakan bahasa daerah setempat dan/atau bahasa Melayu;
4. Pelajaran dasar yang diberikan terdiri dari: membaca, menulis dan berhitung;
5. Pelajaran pilihan terdiri dari: berhitung, ilmu bumi, sejarah, ilmu alam, ilmu hayat, pertanian, menggambar, menyanyi dan bahasa Belanda;
6. Biaya sekolah secara keseluruhan dikurangi penerimaan yang diperoleh sekolah, ditanggung pemerintah; dan

112 Lihat Deliar Noer, 1978, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia*, New York: Modern Indonesian Project Southeast Asia Program Cornell University, halaman 132 dan Robert van Niel, 1984, *The Emergence of The Modern Indonesian Elite*, terjemah Zahara Dellar Noer, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, Jakarta: Pustaka Jaya, halaman 59-118 dalam M.T. Arifin, *Ibid.* halaman 197-202

memberikan pendidikan yang memadai kepada rakyat-- sebagai balas budi Belanda terhadap rakyat pribumi Hindia Belanda. Di sisi lain juga tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan pendidikan kolonial Belanda juga merupakan upaya untuk mendukung sistem tanam paksa (*cultuur stelsel*) dan mengikis peranan pesantren --diperlukan sebagai media internalisasi nilai dan budaya Barat (westernisasi dan sekularisasi) sesuai pemikiran Snouck Hurgronje sebagaimana diterapkan oleh D. Fock Menteri Urusan Tanah Jajahan di tahun 1905 dan Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz pada masa setelahnya.

Setelah A.W.F. Idenburg diangkat sebagai Gubernur Jenderal sebagai konsekuensi kemenangan partai sayap kanan (koalisi Partai Liberal dan Partai Kristen), dibuatlah kebijakan perluasan pengaruh penjajahan (*Pax Nederlandica*) dengan menggunakan agama yang diselenggarakan melalui perluasan pendidikan. Sejak tahun 1909 pemerintah kolonial Belanda memberikan kedudukan yang sama antara sekolah pemerintah dan sekolah agama, bahkan Belanda membuka sekolah agama di seluruh daerah. Selain itu, kebijakan pembukaan dan perluasan sekolah agama juga didukung kebijakan terselubung *Pax Nederlandica* dalam bentuk "Edaran Minggu" (berita ruhani Kristen) dan "Edaran Pasar" (berita atau anjuran pemerintah) di tahun 1910.¹¹²

Karena itu tidak mengherankan, sekalipun pada tahun 1854 pemerintah kolonial Belanda membuat konstitusi dan peraturan administrasi baru yang mencantumkan tentang upaya mendorong pembangunan sekolah bagi kaum pribumi, namun dalam prakteknya sekolah-sekolah Belanda, baik sekolah pemerintah maupun sekolah agama selain mengajarkan agama Kristen juga lebih diperuntukkan bagi murid pribumi yang memeluk agama Kristen, anak bupati (*regent*), dan anak tuan tanah.

Sekolah Belanda ini dibuat berdasarkan klasifikasi, yaitu:

- a. *Tweede Klasse* (Ongko Loro): sekolah yang ditempuh selama 3 (tiga) tahun bagi anak pejabat menengah dengan pelajaran berhitung, menulis dan membaca, dengan bahasa pengantar bahasa daerah.

Sejak tahun 1907 di daerah pedesaan, sekolah ini dirintis dengan nama Sekolah Desa (*Volkschool*).

- b. *Eerste Klasse* (Ongko Siji): sekolah bagi anak pegawai tinggi dilakukan mulai dari 4 tahun hingga 7 tahun yang mengajar beragam pelajaran umum, seperti: ilmu bumi, sejarah, ilmu hayat, menggambar, ilmu ukur tanah, dengan pengantar bahasa Melayu pada 3 tahun pertama dan setelah itu menggunakan bahasa Belanda. Sekolah Ongko Siji (*Eerste Klasse*) dalam perkembangannya di tahun 1912 diubah menjadi Sekolah Belanda-Indonesia (*Hollandsch Inlandsche School* (HIS)). Sekolah ini juga didirikan di daerah pedesaan dengan nama Sekolah Sambungan (*Vervolg School*). Bagi murid Sekolah Desa (*Volkschool*) dapat meneruskan ke Sekolah Sambungan (*Vervolg School*) setelah terlebih dahulu menempuh pendidikan di Sekolah Sambungan (*Schakel School*) untuk belajar Bahasa Belanda selama 3 (tiga) tahun.

Sementara untuk memenuhi kebutuhan guru sekolah *Tweede Klasse* dan *Eerste Klasse* tersebut, pemerintah Belanda pada tahun 1852 mendirikan Sekolah Guru (*Kweekschool*) di Surakarta. Sekolah ini berkembang pesat karena menarik minat banyak priyayi Jawa, sebab lulusan *Kweekschool* menjadi profesi yang prestisius dan terhormat pada saat itu.

Dalam hal pendidikan sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hingga tahun 1871 pemerintah kolonial Belanda menerapkan beberapa kebijakan tentang pendidikan sebagai berikut:

1. Jumlah sekolah guru perlu ditambah;
2. Sekolah tingkat dasar terutama ditujukan untuk mendidik anak-anak bangsawan, tetapi juga anak-anak orang kebanyakan;
3. Pengajaran dengan menggunakan bahasa daerah setempat dan/atau bahasa Melayu;
4. Pelajaran dasar yang diberikan terdiri dari: membaca, menulis dan berhitung;
5. Pelajaran pilihan terdiri dari: berhitung, ilmu bumi, sejarah, ilmu alam, ilmu hayat, pertanian, menggambar, menyanyi dan bahasa Belanda;
6. Biaya sekolah secara keseluruhan dikurangi penerimaan yang diperoleh sekolah, ditanggung pemerintah; dan

112 Lihat Deliar Noer, 1978, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia*, New York: Modern Indonesian Project Southeast Asia Program Cornell University, halaman 132 dan Robert van Niel, 1984, *The Emergence of The Modern Indonesian Elite*, terjemah Zahara Deliar Noer, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, Jakarta: Pustaka Jaya, halaman 59-118 dalam MT. Arifin, *Ibid*, halaman 197-202

7. Agama tidak diajarkan sebagai mata pelajaran pada sekolah pemerintah.¹¹³

Pembaharuan Pendidikan Muhammadiyah

Kyai Haji Ahmad Dahlan memiliki latar belakang dan kebiasaan hidup sejak kecil berada dalam bimbingan dan didikan ayahnya Kyai Haji Abu Bakar (Imam dan Khatib Masjid Besar Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat) dalam hal menulis dan membaca, kemudian beliau belajar ilmu agama dan ilmu lain kepada banyak guru, seperti: KH. Muhammad Shaleh (Fiqih), KH. Abdul Hamid (ilmu Falak), KH. Muhsin (Nahwu), Kyai Mahfud Termas dan Syekh Khayyat (Hadis), Syekh Amin dan Sayid Bakri Satock (Qira'ah al-Qur'an), Syekh Hasan (ilmu pengobatan dan racun), R. Ng. Sosro Soegondo (guru sejarah dan tokoh Ahmadiyah), R. Wedana Dwijosewoyo (tokoh Boedi Oetomo), Syekh M. Yamin Jambek, Imam Syafi'i Sayyid Bakir Syantha, Kyai Asy'ari Baceyan, Syekh Ali Mishri, dan lain-lain. Pengaruh pendidikan dan kebiasaan belajar sejak kecil turut membentuk pribadi Dahlan menjadi seorang yang gelisah dan peduli terhadap kondisi masyarakat dan umat Islam yang berada dalam kebodohan, keterbelakangan dan ketidakmampuan bersekolah –baik karena terlarang bersekolah atau karena mahal biaya sekolah Belanda dan sekolah Kristen.

Terobosan dalam bidang pendidikan yang dilakukan pertama kali oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1904-1905 adalah mendirikan pondok atau asrama untuk menampung pelajar dari luar daerah yang belajar di Yogyakarta. Pada awalnya siswa yang belajar hanya 6 orang namun setengah tahun kemudian jumlah siswa yang belajar meningkat pesat. Selain itu Kyai Dahlan turut mengajarkan pendidikan agama Islam kepada para siswa di sekolahan Belanda, seperti *Kweekschool* (sekolah Raja) di Jetis dan sekolah OSVIA (*Opleiding School Voor Inlandse Amtenaren*) atau sekolah Pamong Praja di Magelang. Kemudian Kyai Dahlan di sela-sela aktivitas organisasi Boedi Oetomo, pada tahun 1908-1909 beliau mendirikan sekolah formal pertama, yakni sebuah Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah yang bertempat di ruang tamu rumah beliau yang hanya berukuran 2,5 X 6 M². Sekolah tersebut merupakan sekolah pribumi pertama yang dikelola secara modern

dengan menggunakan metode dan kurikulum baru, serta memakai sistem pengajaran klasikal dengan menggunakan kursi, bangku, papan tulis dan alat peraga.¹¹⁴

Terobosan pendidikan dan rintisan sekolah yang dikembangkan oleh Kyai Dahlan sesuai dan diperkuat dengan tujuan Muhammadiyah yang ditetapkan dalam Kongres Muhammadiyah tahun 1914, yaitu:¹¹⁵

- a. Memajukan dan mengembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia Belanda;
- b. Memajukan dan mengembirakan cara kehidupan sepanjang kemauan agama Islam kepada lid-lidnya;
- c. Mendirikan atau memelihara atau membantu sekolah-sekolah; dan
- d. Mengadakan pelbagai perkumpulan untuk membahas perkara Islam.

Selanjutnya, pada tahun 1918 setelah pendirian Hizbul Wathan, Kyai Dahlan juga mendirikan sekolah baru atau madrasah yang diberi nama *al-Qism al-Arqa* di Kauman Yogyakarta. Di sela itu, beliau mengajari pemuda dan remaja yang kurang terbina akhlak dan mentalnya dihimpun dalam forum pengajian khusus atau lebih tepatnya kelompok diskusi yang disebut *Fathul Asrar Miftahus Sa'adah*¹¹⁶. Pesertanya adalah tokoh muda yang aktif membantu Kyai Dahlan mengurus Muhammadiyah, seperti: Kyai Haji Ibrahim, Haji Moehtar, Haji Soeja', Haji M. Fachroeddin, Ki Bagoes Hadikoesoema, Kyai Haji Mohammad Hisyam, Haji Hadjid, Abdoel Hamid, M. Abdoellah, dan M. Basiran. Selanjutnya, 2 (dua) tahun setelah itu, Kyai Dahlan merubah madrasah tersebut menjadi Pondok Muhammadiyah. Tetapi karena ada kebutuhan akan guru, maka pondok tersebut diubah menjadi Sekolah Guru (*Kweek School*).

114 Abdul Munir Mulkhan, 1990, *Warisan Intelektual K.H. Ahmad Dahlan dan Amal Muhammadiyah*, Yogyakarta: Penerbit PT Percetakan Persatuan, halaman 70

115 K. Poerbopranoto, *Soesoenan Politik dan Pergerakan Pemoeda Indonesia*, dalam A. Zainoel Ihasan dan Pitut Suharto (ed.), 1981, *Maju Setapak: Capita Selecta Ketiga Pergerakan Pemuda Jong Java, Jong Batak Bond, Jong Sumatranen Bond, dan lain-lain dalam Dokumen Asli*, Jakarta: Jaya Sakti, halaman 330, dalam MT. Arifin, *Ibid*, halaman 119

116 Forum ini merupakan pembinaan mental, berfikir bebas dan beradu argumentasi. Di dalam forum ini diadakan diskusi yang pesertanya dilatih debat secara terbuka dan dapat saling mengkritik secara bebas. Hal ini berdasarkan keterangan Mohammad Djazman al-Kindi dalam MT. Arifin, *Ibid*, halaman 119

113 M. Hutasoit, 1954, *Compulsory Education in Indonesia*, Paris: Unesco, halaman 22 dalam MT. Arifin, *Ibid*, halaman 196-197

Dengan kegigihan dan pengorbanan yang luar biasa, Kyai Dahlan hingga tahun 1922 atau 1 (satu) tahun sebelum wafat (1923), beliau telah berhasil mendirikan 8 (delapan) jenis sekolah dengan 73 orang guru dan 1.019 orang siswa, serta 50 tempat kursus. Sekolah-sekolah tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Opleiding School* di Magelang;
2. *Kweek School* di Magelang dan Purworejo;
3. *Normaal School* di Blitar;
4. NBS di Bandung;
5. *Algemeene Middelbare School* (AMS) di Surabaya;
6. TS di Yogyakarta;
7. Sekolah Guru di Kotagede (didirikan bekerjasama dengan Perkumpulan Krido Mataram Kotagede); dan
8. *Hoogere Kweek School* di Purworejo.¹¹⁷

Setelah itu juga didirikan sekolah-sekolah baru, seperti: Taman Kanak-Kanak *Bustanul Athfal* (1926), *Hollandsch Inlandsche School (HIS) met de Qur'an* yang kemudian diubah menjadi HIS Muhammadiyah di Jakarta, MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*), HIK Muhammadiyah (*Hollandsch Inlandsche Kweekschool*), *Schakel School Muhammadiyah*, Pondok Muhammadiyah, Muallimin dan Muallimat, dan lain-lain.¹¹⁸

Untuk mengurus sekolah-sekolah tersebut, maka Muhammadiyah membentuk bagian pengajaran/sekolahan dan penilik/pemeriksa pelajaran agama. Pengurus Bagian pengajaran pertama kali diketuai Haji Mohammad Hisyam, sementara bertindak sebagai penilik/pemeriksa pelajaran agama dilakukan oleh R. Haji Djalal dan R. Haji Hadjid.¹¹⁹ Dalam perkembangannya didirikanlah Majelis Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada tahun 1923, yang belakangan

dipecah menjadi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dan Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan. Namun Majelis Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan juga dipecah lagi menjadi Majelis Pendidikan Tinggi (DIKTI) dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang).

Majelis Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (MPPK) mengemban tugas dan tanggung jawab untuk¹²⁰:

1. Menanamkan kesadaran akan pentingnya bidang pendidikan dan pengajaran sebagai rangkaian usaha untuk terciptanya tujuan persyarikatan serta mengerahkan anggota-anggota untuk berbuat dalam bidang tersebut;
2. Memimpin dan membantu usaha cabang dalam usaha di bidang pendidikan dan pengajaran;
3. Membantu dan mengkoordinasikan usaha/kegiatan anggota dan masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan maksud dan tujuan persyarikatan;
4. Mengadakan pendidikan untuk:
 - a. membentuk tenaga pendidik dan pengajar yang berjiwa Muhammadiyah,
 - b. mempertebal keyakinan agama dan kesadaran ber-Muhammadiyah kepada tenaga pendidik dan pengajar, serta
 - c. mempertinggi mutu dan kecerdasan tenaga pendidikan dan pengajaran;
5. Mengusahakan kelengkapan alat-alat pengajaran dan pendidikan serta alat-alat administrasi sekolah; dan
6. Membuka dan menyelenggarakan sekolah/madrasah dan asrama di tempat yang strategis.

Selanjutnya setelah Kongres Muhammadiyah ke-23 tahun 1934, dihasilkan suatu ketetapan untuk mengubah nama sekolah Muhammadiyah dengan nama yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Arab, seperti:

1. *Kweekschool Moehammadijah* dan *Kweekschool Istri* diubah menjadi madrasah *Moe'alimin* dan *Moe'alimat Moehammadijah*.
2. *Volkschool*, *Vervolkschool* dan *Standaard School Moehammadijah*

120 MT. Arifin, *Ibid*, halaman 129 dan 233-234 atau lihat Mustafa Kamal Pasha, dkk., 1970, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, Yogyakarta: PP. Muhammadiyah, halaman 76-77

117 Abdul Munir Mulkhan, *Ibid*, halaman 74

118 Pada Sekolah-sekolah Muhammadiyah seperti HIS, HIK, MULO, *Schakel School* materi pelajaran agama bobotnya antara 10-15% dari keseluruhan kurikulum pendidikan sekolah. Dalam perkembangannya di sekolah Muhammadiyah, materi pelajaran umum 60% dan sisanya pelajaran agama, sementara di madrasah Muhammadiyah materi pelajaran agama 60% dan sisanya pelajaran umum, sekalipun untuk kasus Muallimin dan Muallimat perbandingannya hampir sama 50% agama dan 50% umum. Selanjutnya komposisi kurikulum sistem pendidikan nasional terus berubah perbandingannya, mulai 70:30, 90:10, hingga saat ini 100% plus agama untuk sekolah agama milik pemerintah.

119 Abdul Munir Mulkhan, *Ibid*

- diubah menjadi Sekolah Moehammadijah I.
3. *H.I.S. Moehammadijah* diubah menjadi sekolah Moehammadijah II.
 4. *Schakel School Moehammadijah* diubah menjadi Sekolah Persamboengan Moehammadijah.
 5. *Normaal School Moehammadijah* diubah menjadi Sekolah Goeroe Moehammadijah.
 6. *H.I.K. Moehammadijah* diubah menjadi Sekolah Goeroe Moehammadijah II.
 7. *Cursus Goeroe Desa Moehammadijah* diubah menjadi Koersoes Goeroe Moehammadijah I.
 8. *MULO Moehammadijah* diubah menjadi Sekolah Pertengahan Moehammadijah I.
 9. *A.M.S. Moehammadijah* diubah menjadi Sekolah Pertengahan Moehammadijah II.
 10. *Sekolah Diniyah Moehammadijah* diubah menjadi Madrasah Diniyah Moehammadijah.
 11. *Sekolah Woestho Moehammadijah* diubah menjadi Madrasah Woestho Moehammadijah.
 12. *Tablighschool Moehammadijah* diubah menjadi Madrasah Moeballighin Moehammadijah.
 13. *Cursus Anti Analfabetisme* diubah menjadi Koersoes Pembasmi Buta Huruf.¹²¹

Selain penggantian nama dan penataan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang sudah didirikan sebelumnya, Muhammadiyah juga mendirikan dan mengembangkan pendidikan non-formal dan informal yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan sumber daya kader Muhammadiyah yang militan, memiliki kemampuan berdakwah dan berorganisasi, serta kematangan kepemimpinan (*leadership*). Maka diadakanlah kursus keagamaan secara khusus, seperti Mubalighin, Wustha Muallimin Zuama' dan Zaimat, Kepanduan Hizbul Wathan, pelatihan Tarjih, serta Upgrading Organisasi.

Selanjutnya pada Kongres seperempat abad Muhammadiyah tahun 1937 di Jakarta, ditetapkan program pemberantasan buta huruf dan tercetuslah ide untuk mendirikan perguruan tinggi Islam. Namun

sayang ide tersebut tidak terlaksana, tetapi ide tersebut paling tidak mendorong lahirnya Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta. Adapun pembentukan perguruan tinggi Muhammadiyah baru terlaksana pada tahun 1955. Dalam perkembangannya, pertumbuhan sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah merupakan yang terbesar di Indonesia dan di dunia sebagaimana diakui oleh James L. Peacock (1992) dalam bukunya *"Purifying The Faith: The Muhammadiyah Movement in Indonesian Islam"*. Saat ini menurut Pusat Data Muhammadiyah terdapat tidak kurang 4623 TK/TPQ, 2604 SD/MI, 1772 SMP/MTS, 1143 SMA/SMK/MA, dan 172 perguruan tinggi Muhammadiyah.¹²²

Identitas dan Filsafat Pendidikan Muhammadiyah

Gagasan pembaharuan pendidikan Muhammadiyah yang dipelopori Kyai Haji Ahmad Dahlan dilandasi substansi wahyu pertama Surat al-Alaq, yakni *iqra' bismi rabbikalladzi khalaq* (bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan). Perintah Allah ini menuntut setiap muslim wajib mengetahui atau memiliki ilmu, baik ilmu agama untuk memahami wahyu Allah maupun ilmu pengetahuan untuk memahami *ayat-ayat kauniyah* (gejala dan tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat di alam semesta). Menurut Kyai Dahlan pemahaman ilmu harus utuh dan integralistik dengan sumbernya, yaitu Allah. Karena itu, ilmu mencakup agama dan pengetahuan umum. Hal ini berkesesuaian dengan pemikiran M. Rasyid Ridha yang menganggap terdapat kesatuan antara ilmu dan agama. Selain di dalam Surat al-Alaq, sebenarnya terdapat ratusan lebih ayat al-Qur'an, seperti: QS. al-Qalam (68): 1, ar-Rahman (55): 1-4, al-Mujadilah (58): 11, az-Zumar (39): 9, Luqman (31): 27, al-Ankabut (29): 43, dan ayat-ayat lain, serta diperkuat dengan hadits-hadits Nabi SAW, seperti: *طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ* (menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki

122 Data bersumber dari <http://mdc.umm.ac.id>, bandingkan data amal usaha pendidikan Muhammadiyah di atas dengan data yang terdapat dalam Profil Muhammadiyah 2005, dimana Muhammadiyah tercatat memiliki amal usaha pendidikan yang terdiri dari: 1132 Sekolah Dasar (SD), 1769 Madrasah Ibtidaiyah/Diniyah (MI/MD), 1184 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 534 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 511 Sekolah Menengah Atas (SMA), 263 Madrasah Aliyah (MA), 172 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 67 Pondok pesantren, 55 Akademi, 4 Politeknik, 70 Sekolah Tinggi, dan 36 Universitas.

dan perempuan), “أَطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى الْهَدْيِ” (tuntutlah ilmu dari buaian sampai liang lahat), أَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ فِي الصَّيْنِ (tuntutlah ilmu walau ke negeri China) atau hadits-hadits lainnya.¹²³

Gagasan asli Kyai Dahlan dalam konteks kependidikan terangkum ucapan beliau: “*dadiyo kyai sing kemajuan lan aja kesel anggonmu nyambung gawe kango Muhammadiyah*” (jadilah kyai atau orang yang berkemajuan dan jangan kenal lelah bekerja untuk Muhammadiyah). Pemikiran Kyai Dahlan tersebut kemudian dituangkan dalam 3 (tiga) bentuk kesatuan

-
- 123 Ada beberapa hadits Nabi SAW mengenai ilmu dan keutamaannya, yaitu:
- Man aradad dunya faalaihi bil ilmi, waman aradal akhirata faalaihi bil ilmi, waman aradahuma maan faalaihi bil ilmi* [siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu, siapa yang menginginkan akhirat harus dengan ilmu, siapa yang menginginkan keduanya juga dengan ilmu]
 - La yazalul rajulu aliman ma thalabal ilma, fainna zhanna annahu kot alima fa kot jahula* [seseorang dianggap berilmu, selama ia masih terus belajar, apabila ia menyangka bahwa ia sudah serba tahu, maka sesungguhnya ia seorang yang jahil [tidak tahu].]
 - Sataghfiru lil alimi ma fassama' wal ardhi* [seluruh isi langit dan bumi memintakan ampun bagi orang yang berilmu]
 - al ulama'u warasatul anbiya* [orang berilmu itu pewaris para nabi]
 - Inna midadal ulama'i la khairun min dhimaish syuhada'* [tinta orang berilmu lebih mulia dari darah para syuhada']
 - Allimu auladakum fainnahum makhlukuuna lizamani ghaira zamanikum* [didiklah anak-anakmu, mereka itu dijadikan untuk menghadapi masa yang lain dari masa kalian]
 - Annasu rajulani, alimun wa mutaallimun wala khaira fima siwahuma* [manusia itu hanya dua macam, orang berilmu dan orang yang belajar, selain kedua golongan ini tidak ada manfaatnya]
 - Lamautu kabilatin aesaru min mauti alimin* [musnahnya suatu kaum lebih mudah ketimbang matinya orang berilmu]
 - Fadlul alimi alal abidi kafadlil qomari ala sairil kawakibi* [kelebihan orang berilmu dari ahli ibadah adalah seperti kelebihan bulan atas bintang-bintang]
 - Innal malaikata lataadho'u ajnihataha lithalibil ilmi ridhom mimma yasna'u* [malaikat-malaikat itu merendahkan sayapnya kepada penuntut ilmu justru karena ia merasa senang atas apa yang dilakukannya]
 - Taallamul ilma fainna taalamuhu lillahi hasanatun wadirasatahu tasbihun wal baitsa anhu jihadun atthalabahu ibadatun watalimahu sadaqatun wabadlahu liahlibi kurbatun* [pelajari ilmu, karena belajar itu bagi Allah merupakan suatu kebaikan, menuntut ilmu merupakan tasbih, mencari ilmu merupakan jihad, mengejar ilmu itu ibadah, mengajarkan ilmu itu sedekah, dan menggunakan ilmu bagi yang membutuhkan merupakan taqarrub kepada Allah]

pendidikan¹²⁴, yaitu:

a. Pendidikan Akhlak (Moral)

Pendidikan akhlak (moral) merupakan pendidikan yang bersifat *practical philosophy* (hikmah amaliah), karena pendidikan ini berusaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Pendidikan akhlak sangat penting, karena watak dan kelakuan manusia berpengaruh besar atas perkembangan masyarakat dalam segala aspeknya serta menentukan corak dan kondisi sosial. Pendidikan akhlak diberikan untuk menjadikan manusia agar dapat memahami dirinya, memperbaiki watak dan kelakuannya, serta memberikan keseimbangan intelektual yang melahirkan kebahagiaan.

b. Pendidikan Individu

Pendidikan individu harus diberikan secara utuh (integralistik dan komprehensif), tidak boleh parsial dan timpang sebagaimana kecenderungan dualisme intelegensia saat itu. Di mana satu sisi, fokus hanya pada pengetahuan dan kemampuan manusia yang terpisah dari Tuhan (sistem pendidikan sekuler Barat) dan sisi lain pendidikan pesantren yang hanya mengajarkan pelajaran agama semata. Pendidikan individu dilakukan sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang berkesimbangan antara perkembangan mental dan jasmani, antara keyakinan dan intelek, antara perasaan dengan akal pikiran, serta antara dunia dengan akhirat. Pendidikan individu berporos pada kedalaman tauhid yang termanifestasikan dalam seluruh aspek kehidupan semesta. Pendidikan individu bersifat *wasathan* (pertengahan) sesuai QS. 2: 143, yaitu berlandaskan pada falsafah pendidikan Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah, sesuai realitas sosial, universal, integralistik, empiris, objektif, terbuka, selektif, terbebas dari dikotomi, dilemma dan pertentangan (harmonis atau memiliki keseimbangan), serta dinamis, progresif dan transformatif.

124 H. Djarnawi Hadikusumo, 1980, *Ilmu Akhlak*, Yogyakarta: Penerbit PT Percetakan Persatuan, halaman 5 dan MT. Arifin, *Ibid*, halaman 216

c. Pendidikan Kemasyarakatan

Adanya tanggung jawab manusia sebagai makhluk sosial, menuntut adanya pendidikan kemasyarakatan yang mampu menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Pendidikan kemasyarakatan penting untuk menumbuhkan kembali spirit untuk saling bantu membantu dalam kehidupan sosial, sehingga terwujud kemajuan, kebangkitan, kesejahteraan, dan kebahagiaan untuk semua. Pendidikan kemasyarakatan merupakan kunci kesatuan pendidikan akhlak dan pendidikan individu yang akan menghasilkan manusia alim yang peka, empatik, dan berkontribusi bagi kehidupan masyarakatnya.¹²⁵

Kesatuan pemikiran mengenai 3 (tiga) bentuk pendidikan di atas semakna dengan substansi pemikiran Kyai Dahlan yang terdapat dalam naskah pidato beliau yang berjudul *"Tali Pengikat Hidup"*, dimana Kyai Dahlan menekankan tentang pencerahan akal suci melalui filsafat dan logika. Sedikitnya ada tiga substansi kunci mengenai pencerahan akal suci, yaitu: (1) pengetahuan tertinggi adalah pengetahuan tentang kesatuan hidup yang dapat dicapai dengan sikap kritis dan terbuka dengan mempergunakan akal sehat dan istiqomah terhadap kebenaran akali dengan didasari hati yang suci; (2) akal adalah kebutuhan dasar hidup manusia; dan (3) ilmu mantiq atau logika adalah pendidikan tertinggi bagi akal manusia yang hanya akan dicapai hanya jika manusia menyerah kepada petunjuk Allah SWT.

Pemikiran Kyai Dahlan tentang pendidikan Islam di atas diperkuat dengan tujuan pendidikan di sekolah Muhammadiyah yang menghendaki lahirnya lulusan (*outcome*) sebagai berikut:

- a. Manusia yang alim dalam ilmu agama.
- b. Yang berpandangan luas dan memiliki pengetahuan umum.
- c. Siap berjuang mengabdikan untuk Muhammadiyah dalam menyantuni nilai-nilai keutamaan pada masyarakat.

Tujuan pendidikan ini kemudian dikembangkan di tahun 1936 dalam Kongres seperempat abad Muhammadiyah di Betawi, karenanya rumusan tujuan pendidikan Muhammadiyah disebut "Rumus Betawi". Adapun isinya sebagai berikut: "...maka buat *eerste periode Muhammadiyah membangun perguruan-perguruan itu dengan berdasar pada 3 tingkatan, yaitu: 1). Menggiring anak-anak Indonesia menjadi orang*

Islam yang berkobar-kobar semangatnya; 2). Berbadan sehat, tegap bekerja; 3). Hidup tangannya mencari rejeki sendiri, sehingga kesemuanya itu memberi faedah yang besar dan berharga hingga badannya dan juga hidup bersama".¹²⁶ Rumus Betawi menekankan usaha membudayakan alam sekitar secara terampil merupakan pencerminan upaya Muhammadiyah untuk menganjurkan suatu etos kerja yang mandiri melalui kekuatan diri, yang berfaedah besar, berharga bagi kehidupan bersama. Menurut Kyai Sahlan Rosyidi¹²⁷, inti dari Rumus Betawi adalah batasan cakupan pendidikan Muhammadiyah yang mengarah pada:

1. Pendidikan manusia muslim.
2. Yang memiliki sikap mental berjuang menegakkan agamanya.
3. Pendidikan sejahtera secara jasmani dan ruhani.
4. Pendidikan keterampilan, kemandirian, dengan mengembangkan pendidikan keterampilan untuk keluarga dan masyarakat sejahtera.

Selanjutnya berdasarkan hasil Muktamar Muhammadiyah ke-34 tahun 1959, Profesor H. Abdul Kahar Mudzakir mengulas bahwa pokok pendidikan Muhammadiyah haruslah mencakup pokok pikiran sebagai berikut:¹²⁸

1. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari tinjauan kita terhadap tujuan hidup manusia.
2. Dalam pada itu manusia dapat ditinjau dari segi sebagai:
 - a. Makhluk Allah.
 - b. Anggota keluarga.
 - c. Anggota masyarakat.
 - d. Warga negara
 - e. Manusia dihadapkan kepada alam.
3. Sebagai makhluk, dia harus beribadah. Sebagai anggota keluarga, dia harus berbakti kepada kedua orang tua. Sebagai anggota masyarakat, dia harus memimpin dan membimbing ke jalan yang benar. Sebagai warga negara, dia harus menjadi warga negara yang

¹²⁶ Kyai Haji Syahlan Rosyidi, 1975, *Perkembangan Filsafat Pendidikan dalam Muhammadiyah*, Semarang: Majelis PPK PWM Jawa Tengah, halaman 8 dalam MT. Arifin, *Ibid*, halaman 212

¹²⁷ Pandangan Kyai Haji Syahlan Rosyidi tersebut merupakan hasil wawancara MT. Arifin dengan Kyai Haji Syahlan Rosyidi pada tanggal 22 Desember 1984 di Surakarta, lihat dalam MT. Arifin, *Ibid*, halaman 213

¹²⁸ MT. Arifin, *Ibid*, halaman 214-215

baik sepanjang tuntunan Islam. Sebagai manusia yang dihadapkan kepada alam, dia harus dapat menguasai alam untuk kemaslahatan umat.

4. Pengertian tinjauan tersebut itu dilaksanakan untuk mencapai sasaran 'muslim' dari pendidikan Muhammadiyah. Dari *tarif* (pengertian) tersebut beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pendidikan Muhammadiyah untuk dapat mencapai sasaran itu:
 - a. Murid harus berjiwa tauhid murni dan beriman.
 - b. Murid harus beribadat kepada Allah.
 - c. Murid harus berbakti kepada orang tua dan baik kepada kerabatnya.
 - d. Murid harus memiliki akhlak tinggi dan halus perasaannya.
 - e. Murid harus berilmu pengetahuan dan mempunyai kecakapan.
 - f. Murid harus cakap memimpin keluarga, masyarakat dan pemerintahan.
 - g. Murid harus yakin dapat menguasai dan mempergunakan alam seisinya untuk kebaikan umat manusia yang akan dibawa berbakti kepada Allah.

Dengan pemikiran demikian, maka dalam pandangan Muhammadiyah dasar pendidikan Islam adalah usaha kemanusiaan sebagai bukti penerimaan amanat kepercayaan Allah terhadapnya. Inti pendidikan Islam adalah pengembangan potensi fitrah manusia sebagai hasil integrasi ruh dan jasad. Sebagian sebagai pendudukan Allah dan sebagian lain berkembang dalam pola mekanisme biologis. Pendidikan Muhammadiyah merupakan sub-sistem dari esensi gerakan Islam dan dakwah Muhammadiyah. Karena itu, pendidikan al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIKA) menjadi dasar peletakan harapan akan keberhasilan pendidikan Muhammadiyah.

Berdasarkan Konferensi Pengajaran Niveau Konsulat seluruh Indonesia di Pekajangan (Pekalongan) tahun 1955 secara sederhana tetapi bernas dirumuskan, bahwa tujuan pendidikan Muhammadiyah adalah membentuk manusia muslim, berakhlak mulia, cakap, percaya kepada diri sendiri dan berguna bagi masyarakat.¹²⁹ Kemudian dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-38 di Ujungpandang tahun 1975,

tujuan pendidikan Muhammadiyah tersebut lebih diperjelas muaranya pada 2 (dua) kaidah tujuan, yaitu:

1. Terwujudnya manusia muslim (sarjana muslim) yang berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri dan berguna bagi masyarakat dan negara, beramal menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
2. Memajukan dan memperkembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk pembangunan masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Dengan basis identitas kependidikan yang berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah, serta landasan filsafat pendidikan yang menekankan logika dan ilmu mantiq, maka berdirilah banyak perguruan atau lembaga pendidikan Muhammadiyah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Identitas pendidikan Muhammadiyah yang terangkum dalam pemikiran Noeng Muhadjir, Mohammad Ali dan Marpuji Ali terdiri atas 5 (lima) identitas, yakni: 1). Menumbuhkan cara berpikir tajdid/inovatif (pembaharuan); 2). Memiliki kemampuan antisipatif; 3). Mengembangkan sikap pluralistik; 4). Memupuk watak mandiri; dan 5). Mengambil langkah moderat.¹³⁰ Itulah kenapa dalam perkembangannya, pendidikan Muhammadiyah mendapat pengakuan, baik di dunia internasional maupun dalam negeri karena dinilai unggul, mutu pendidikan diakui, kompetitif dan telah menghasilkan banyak lulusan yang tersebar di banyak lembaga negara maupun swasta. Pendidikan Muhammadiyah diakui karena dianggap memiliki kualitas dan keunggulan dari sisi sistem pendidikan, landasan filsafat kependidikan maupun *outcome* yang dihasilkan, kekhasan program yang diajarkan, serta kelembagaan yang mandiri dan berorientasi sosial (*non-profit*).

¹³⁰ Gagasan Noeng Muhadjir, (1994: 183-187), *Dinamika Pendidikan Muhammadiyah*, dalam Imron Nasri dan Hasan Kunio (ed.), 1994, *Di Seputar Percakapan Pendidikan Dalam Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. Gagasan ini kemudian dikembangkan Mohammad Ali dan Marpuji Ali, (2005: 119-135), *Mazhab Al-Maun: Tafsir Ulang Praksis Pendidikan Muhammadiyah*, Yogyakarta: Apeiron. Lihat Mohammad Ali, 2010, *Reinvensi Pendidikan Muhammadiyah*, Jakarta: Al-Wasat, halaman 35.

Tantangan dan Harapan Pendidikan Muhammadiyah

Dalam konteks pendidikan global, dunia pendidikan dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan, baik terkait dengan paradigma pendidikan yang diterapkan, materi yang diajarkan, metodologi pembelajaran, hingga menyangkut kualitas lulusan yang dihasilkan. Untuk itu muncullah banyak gagasan besar tentang konsep pendidikan, seperti kritik Ivan Illich yang dikenal dengan "*deschooling society*", dimana menurut Illich sekolah saat ini hanya memperkuat struktur kelas (kelembagaan) bagi kelas menengah atas dan mengabaikan mereka yang miskin. Karena itu Illich mengusulkan *learning webs* (jaringan belajar) yang menjadikan sekolah lebih terbuka dan menjangkau kelas manapun. Kemudian pandangan Everet Reinier bahwa "*school is dead*", sebab menurutnya sekolah hanya menjadi institusi *privelesse* dan instrumen utama mobilitas vertikal. Sekolah hanya jalan mencari status sosial, memudahkan memilih pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik, tetapi lupa dengan hakekat pembelajaran yang sebenarnya dan tujuan pendidikan untuk dapat melakukan pencerahan bagi manusia dan perbaikan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, pemikiran Paulo Freire tentang "*Pedagogy of the Oppressed*". Menurut Paulo Freire pendidikan yang dikembangkan belakangan ini menjadikan siswa atau murid hanya sebagai gudang atau wadah yang perlu diisi sebanyak mungkin (*banking concept of education*), sehingga pendidikan terkesan mekanis seperti robot tetapi melupakan falsafah pendidikan yang menuntut adanya penyadaran (*conscientization*) dan tujuan pendidikan yang sebenarnya ingin menjadikan manusia yang mampu menemukan kesadaran dirinya sebagai manusia.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, Muhammadiyah juga tidak dapat melepaskan diri dari munculnya berbagai masalah dan tantangan dalam pendidikan. Selain masih dianggap kurang dalam mengadakan pendidikan formal untuk melahirkan ahli agama (ulama) dibandingkan sekolah umum, menurut Kuntowidjoyo, Muhammadiyah dihadapkan pada munculnya gejala individualisme yang mengarah pada budaya kapitalisme Calvinistik. Di samping itu, produk pendidikan Muhammadiyah tidak sesuai dengan etik kerja pendidikan Muhammadiyah yang ditanamkan kepada para siswa sebagai akibat perubahan struktur masyarakat Indonesia dan industrialisasi. Etik kerja keras yang penuh kejujuran yang diajarkan di sekolah Muhammadiyah

kurang relevan dengan liku-liku birokratis dan pragmatisme yang berkembang di Indonesia saat ini. Sementara itu menurut Sarino Mangunpranoto, pendidikan Muhammadiyah belum memiliki "*kultural filosofis*", yaitu kaidah fundamental pemikiran Islam di Indonesia yang mempunyai kaitan sosio-historis dengan perubahan sosio-kultural nasionalisme Indonesia. Hal ini penting untuk mewujudkan Islam yang paripurna (universal) dan dapat mencetak pribadi muslim yang mantap di atas setrisme kultur nasionalisme Indonesia.¹³¹

Selanjutnya, berdasarkan praktek pengelolaan amal usaha pendidikan selama ini, paling tidak terdapat 3 (tiga) akar persoalan yang menyebabkan rendahnya tingkat keberdayaan pengelolaan pendidikan Muhammadiyah, yaitu:¹³²

a. Kelemahan Pendataan

Kelemahan ini mengakibatkan tidak jelasnya kekuatan dan kelemahan yang dipunyai sekolah atau lembaga pendidikan Muhammadiyah, sehingga berakibat kepada ketidakjelasan arah pembinaan dan pengembangan yang akan dilakukan dalam pengelolaan sekolah atau lembaga pendidikan Muhammadiyah. Pengelola pendidikan Muhammadiyah dituntut mampu melakukan pendataan yang bersandar pada prinsip SWOT (*strengths/kekuatan, weaknesses/kelemahan, opportunities/pejuang, dan threats/ancaman*), sehingga memungkinkan pendataan yang dilakukan menghasilkan solusi pemecahan dan lahirnya inovasi pendidikan yang secara praksis dapat merealisasikan terbentuknya sekolah teladan dan unggulan Muhammadiyah.

b. Kelemahan Pendanaan

Kelemahan dalam bidang pendanaan mengakibatkan sulitnya pendidikan Muhammadiyah mempertahankan eksistensinya dalam menghadapi persaingan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dengan peran sebagai gerakan dakwah dan gerakan pendidikan yang bertujuan mencerdaskan semua lapisan masyarakat, non-profit, dan mampu melakukan inovasi dan pembaharuan di dunia pendidikan, Muhammadiyah sering dihadapkan pada dilemma

131 MT. Arifin, Ibid, halaman 224-225

132 PP. Muhammadiyah, tt, *Materi Pendidikan Khusus Kepala dan Wakil Kepala Sekolah Muhammadiyah*, Jakarta: Majelis Pendidikan dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, halaman 54

sebagai lembaga sosial yang dituntut merealisasikan sekolah teladan di satu sisi, namun dihadapkan pada kendala pembiayaan sekolah –yang tidak dapat dicukupi hanya dengan mengandalkan sumbangan donator– kelangsungan hidup sekolah dan pemenuhan kesejahteraan tenaga pendidik di sisi lain yang juga mendesak untuk diperhatikan dengan baik. Karena itu diperlukan upaya pengembangan usaha ekonomi untuk menopang kebutuhan pendanaan sekolah, melibatkan dukungan pemerintah dan CSR (*corporate social responsibility*) berbagai perusahaan dalam pengelolaan pendidikan Muhammadiyah, dan meningkatkan kualitas *outcome* atau lulusan yang dihasilkan, sehingga memungkinkan lulusan dapat menjadi manusia yang berhasil dan dapat ikut berpartisipasi dalam mendorong kelangsungan dan kemajuan pendidikan Muhammadiyah.

c. Kelemahan Penataan

Kelemahan ini mengakibatkan berkembangnya suasana ketidakpastian hukum serta tidak berjalannya mekanisme pengelolaan pendidikan sebagaimana mestinya. Konsep penataan seringkali tidak berjalan simultan dan kontinu *sebagai* suatu sistem penataan yang integralistik seiring pergantian pimpinan amal usaha pendidikan atau penyesuaian dengan politik dan kebijakan pendidikan pemerintah. Karena itu harus dibuat suatu *grand design* pendidikan Muhammadiyah yang memiliki orientasi penataan jangka panjang dan berkesinambungan (*sustainability*).

Menurut pemikiran Reynolds, Postlethwaite, Ross, dan Hopkins paling tidak terdapat 7 (tujuh) unsur untuk membentuk sekolah efektif, yaitu: 1). Orientasi pada prestasi; kepemimpinan sekolah tangguh; 3). Iklim sekolah kondusif; 4). Adanya konsensus dan kohesivitas; 5). Berorientasi pada pembelajaran atau kurikulum; 6). Evaluasi; dan 7). Keterlibatan masyarakat. Ketujuh unsur tersebut harus dimanifestasikan dalam seluruh gerak dan perilaku sekolah dan warganya. Ketujuh unsur tersebut harus dilengkapi dengan 4 tahap perubahan atau inovasi pendidikan menurut Michael Fullan, yaitu: tahap inisiasi (*initiation*), tahap implementasi (*implementation*), tahap kontinuitas (*continuation*), dan tahap melihat produk atau hasil (*outcome*).¹³³

133 Mohamad Ali, *Ibid*, halaman 36

Untuk membentuk sekolah unggulan (efektif/baik), SD Muhammadiyah Sapen memiliki rumus 3M plus E, yaitu *Material, Money, Man*, dan *Educative*. Konsep sekolah unggulan tersebut tidak jauh berbeda dengan gagasan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tentang standar minimal pendidikan yang terdiri dari: standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.¹³⁴ Menurut Prof. Dr. Khairurrijal, Eng. terdapat 5 (lima) aspek menuju sekolah yang luar biasa (*excellent*): *Pertama, Customer Focus*, artinya menindaklanjuti langsung keluhan dari konsumen dan melayani kebutuhan yang memudahkan konsumen mengakses sekolah. Kemudian memberikan layanan dan lulusan siswa yang unggul dalam kualitas, serta mengantisipasi isu negatif yang beredar pada konsumen. *Kedua, Leadership*, artinya kepemimpinan yang proaktif dalam meningkatkan program pemberdayaan guru dan karyawan. Pemimpin yang paham tentang organisasi dan dapat membuat goal dan ekspektasinya. *Ketiga, Internal Business*, artinya sekolah mampu membuat alat ukur manajemen keputusan dan memiliki langkah-langkah prosedur (SOP) yang benar-benar diimplementasikan. *Keempat, Innovation and Learning*, artinya terus mengupayakan inovasi baru dan terus belajar untuk menjadi yang terbaik –dalam bahasa Prof. Dr. Imam Robandi, Eng. Sekolah harus terus melakukan *rebranding* terhadap sekolah dan pendidikannya, sesuai perubahan (*change*) dan perkembangan (*dynamic*) masyarakat. *Kelima, Financial*, artinya memiliki sumber pendanaan dan mampu memenuhi kebutuhan sekolah dengan baik.¹³⁵ Sedangkan secara sederhana Mohamad Ali selaku Kepala

134 Untuk mewujudkan sekolah unggulan, pemerintah menerapkan pada kasus MIN Malang yang memiliki 10 ciri, yaitu: 1). Fasilitas fisik dan perlengkapan yang baik; 2). Guru-guru dan staf pendukung yang kompeten dan memiliki komitmen yang tinggi; 3). Pembelajaran yang terdeferensiasi; 4) harapan dan kepercayaan yang tinggi, dan dorongan yang kuat dari orang tua dan masyarakat sekitar; 5). Organisasi yang rasional dan harmonis; 6). Komitmen yang tinggi terhadap budaya dan agama; 7). Iklim kerja yang sehat serta motivasi dan semangat kerja yang tinggi; 8). Keterlibatan wakil kepala sekolah dan guru-gurunya; 9). Dukungan figure-figur kreatif yang kaya wawasan dan gagasan; dan 10). Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Lihat Arif Furchan, 2004, *Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia: Anatomi Keberadaan Madrasah dan PTAI*, Yogyakarta: Gama Media, halaman 99-100 atau dalam Mohamad Ali, *Ibid*, halaman 111-112

135 Intisari dari "National Workshop for International Networking and Branding"

Sekolah 3 SD Muhammadiyah unggulan di Kottabarat, Boyolali dan Karanganyar berdasarkan pengumpulannya selama ini mengembangkan konsep 4 sehat 5 sempurna, yaitu: 4 langkah menggambar sekolah unggul, membaca peta situasi masyarakat, menghitung tantangan dan peluang, dan melakukan, serta disempurnakan dengan langkah ke-5 menulis (merefleksikan) apa yang telah dilakukan.¹³⁶

Sekalipun pendidikan Muhammadiyah menghadapi banyak masalah kependidikan dan tantangan pendidikan, baik dari internal Muhammadiyah maupun kompetisi dari lembaga dan perguruan pendidikan lain yang hanya menawarkan sekolah unggulan berbiaya mahal, seperti Sekolah Islam al-Azhar, Sekolah Islam Terpadu, sekolah Lazuardi, sekolah alam, *Home Scholling* Kak Seto, Madrasah Insan Cendekia atau madrasah model pemerintah, serta sekolah rintisan berstandar internasional (SRBI) dan sekolah berstandar internasional milik pemerintah. Namun perguruan Muhammadiyah tetap mampu bersaing secara sehat dengan berbagai terobosan, inovasi dan kemampuan menyikapi kondisi pendidikan dan kebutuhan masyarakat.

Beberapa contoh sekolah Muhammadiyah yang unggulan, yaitu: SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Solo dengan kurikulum syariah dan buku teks sains syariah, SD Muhammadiyah Program Khusus di Kabupaten Boyolali, SD Muhammadiyah plus Malangiwan Colomandu di Kabupaten Karanganyar, SD Muhammadiyah Sapen dan SD Condongcatur di Yogyakarta, SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen, SD al-Kautsar Muhammadiyah Gompang Kartasura Sukoharjo, SD Muhammadiyah Alternatif Magelang (dikenal SD Mutual), SD *Fullday School* Muhammadiyah Tayu Pati, MI Muhammadiyah 2 Kudus Program Khusus, Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 16 Surabaya, SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya, SMP Muhammadiyah 1 Babat Lamongan, SMP Muhammadiyah 1 Surakarta, SMP Muhammadiyah 2 Denpasar, SMP Muhammadiyah 1 Makassar, SMP Muhammadiyah 7 Medan, SMK Muhammadiyah Magelang, SMU Muhammadiyah 1 Yogyakarta, SMK Muhammadiyah Babat Lamongan, SMU

yang diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dengan tema, "Memulai dari Satu Langkah Keberhasilan untuk Menyongsong Seribu Keberhasilan Sekolah-Sekolah Muhammadiyah" bertempat di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, mulai Jumat-Minggu (18-20/2/2011). Lihat <http://sekolahkreatifmuh20sby.sch.id/2011/02/workshop-be-excellent-school>

Muhammadiyah 1 Jombang, SMU Muhammadiyah 1 Klaten, dan masih banyak lagi sekolah Muhammadiyah lain.

Beragam sekolah unggulan (efektif/baik) atau sekolah teladan tersebut semoga berdampak pada tumbuh dan tersebarnya gagasan inovasi dan pembaharuan Muhammadiyah dalam pendidikan. Paling tidak berbagai rintisan dan pendirian sekolah-sekolah tersebut menggambarkan bahwa Muhammadiyah masih terus bekerja keras dalam memajukan pendidikan di Indonesia, dan itu artinya masih ada harapan bahwa pendidikan Muhammadiyah akan terus berkembang dan menjadi *icon* pendidikan yang terus diakui mutunya, identitas dan kemandirian kelembagaan, serta *outcome* (lulusan) yang mencerahkan kehidupan masyarakat Indonesia.



UHAMKA PRESS

Jl. Gandaria IV, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7398898/ext: 112,
Website: www.uhamkاپress.com
E-mail: uhamkاپress@yahoo.co.id

ISBN 978-602-8040-67-9



9 786028 040679